

PERSEPSI MAHASISWA FISIP UNDIP TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN SUBSIDI BBM

Oleh

Adi Syafutra

D2B009075

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, SH, Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

Abstract

Recently there have been many student actions that occurred in Indonesia as student political attitude toward social and political condition as well as policies set by the government. One of the policies that was recently refused by the students was the policy to reduce fuel subsidy. It is interesting to know that students gave a lot of attention in this matter. Most students have tried to find out about this policy, followed the process of the production of the policy, and gave their opinion about the policy. This matter has drawn a lot of attention from students because fuel itself is one of society basic needs. Therefore, from this fact, the writer was interested to find out more about student perception towards the government policy to reduce the fuel subsidy in reality.

Based on the result of the research, according to students from Faculty of Social and Politics majoring in government, the government had done the right thing by cutting the budget for fuel subsidy through reducing fuel subsidy. They considered that fuel subsidy itself was not really gave the benefit for medium low class society and it was also not exactly benefited the medium low society instead it was the medium high class society who was benefited for this. However, still according to them, the government had also made mistake with this policy to reduce fuel subsidy because this policy was not followed by a good plan to overcome the impact that it had caused that finally ended up with bad impact for middle low society.

Keywords: Policy to reduce fuel subsidy, Student Perception

Abstrak

Dewasa ini banyak aksi mahasiswa yang terjadi di Indonesia sebagai bentuk penyaraan sikap politik mahasiswa terhadap keadaan sosial politik dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yang baru-baru ini mendapatkan aksi penolakan dari mahasiswa adalah kebijakan pengurangan subsidi BBM. Sisi menarik dalam kebijakan ini adalah besarnya perhatian mahasiswa terhadap kebijakan sehingga dapat dikatakan hampir semua mahasiswa mencari tau, mengikuti proses pembuatan kebijakan, dan berpendapat terhadap kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan BBM adalah kebutuhan masyarakat yang sangat penting. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana sebenarnya persepsi Mahasiswa FISIP Undip terhadap kebijakan pengurangan subsidi BBM.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut Mahasiswa FISIP Undip pemerintah melakukan langkah yang tepat dengan mengurangi anggaran subsidi BBM melalui kebijakan pengurangan subsidi BBM, karena kebijakan itu sendiri tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat kalangan ekonomi bawah dan tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kalangan ekonomi menengah-atas. Namun menurut Mahasiswa FISIP Undip pemerintah juga melakukan kekeliruan karena kebijakan pengurangan subsidi BBM tidak diikuti dengan rencana penanggulangan yang baik untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut sehingga akan memberikan dampak buruk bagi ekonomi masyarakat kalangan ekonomi bawah.

Kata kunci : Kebijakan Subsidi BBM, Persepsi Mahasiswa

PENDAHULUAN

Belakangan ini ada banyak sekali aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penyuaran sikap politik mereka. Aksi ini dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk perhatian dan keberpihakan mereka kepada rakyat kecil dan dilakukan untuk secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, atau secara tidak langsung mengubah opini yang ada dimasyarakat guna kemudian menghasilkan dorongan publik yang besar dan mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan.

Dari beberapa aksi yang terjadi, kebijakan pengurangan subsidi BBM mendapat perhatian paling besar oleh mahasiswa. Aksi berupa penolakan atau dukungan terhadap kebijakan ini terjadi di banyak wilayah di Indonesia, salah satunya di Semarang. Perhatian yang besar ini terjadi karena BBM adalah kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan berkaitan dengan banyak aspek kehidupan masyarakat; baik kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan transportasi maupun kebutuhan produksi.

Kenaikan harga BBM sebenarnya telah terjadi berkali-kali di Indonesia dan selalu mendapat respon negatif oleh masyarakat, oleh karena itu kebijakan yang menimbulkan kenaikan harga BBM menjadi kebijakan yang tidak populis. Namun kali ini Pemerintahan Presiden SBY memutuskan untuk mengambil kebijakan pengurangan subsidi BBM yang mengakibatkan naiknya harga BBM bersubsidi karena didesak oleh APBN yang membengkak akibat anggaran yang terlalu besar untuk subsidi BBM.

Alasan kebijakan pengurangan subsidi BBM diambil karena APBN yang terbebani oleh anggaran subsidi BBM ini dapat diterima begitu saja oleh mahasiswa, termasuk

Mahasiswa Universitas Diponegoro. Ada banyak sekali opini yang beredar dikalangan Mahasiswa Undip. Tidak sedikit mahasiswa Undip yang melakukan aksi demonstrasi untuk menolak kebijakan pengurangan subsidi BBM, dan tidak sedikit juga yang mendukung kebijakan ini. Berdasarkan kondisi tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana sebenarnya persepsi Mahasiswa Undip terhadap Kebijakan Pengurangan Subsidi BBM. Lebih lanjut penulis memfokuskan penelitian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, karena penulis berpendapat bahwa Mahasiswa FISIP memperoleh pendidikan politik yang lebih banyak dibandingkan mahasiswa fakultas lain.

Landasan Teori

1. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Stimulus yang diindera itu kemudian oleh individu diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga individu menyadari, mengerti, tentang apa yang diindera itu, dan proses ini disebut persepsi.¹

Kemp dan Dayton menganggap persepsi sebagai suatu proses dimana seseorang menyadari keberadaan lingkungannya serta dunia yang mengelilinginya. Persepsi terjadi karena setiap manusia memiliki indra untuk menyerap obyek-obyek serta kejadian sekitarnya. Pada akhirnya, persepsi dapat memengaruhi cara berfikir, bekerja, serta bersikap pada diri seseorang. Hal ini terjadi karena orang tersebut dalam mencerna informasi dari lingkungan berhasil melakukan adaptasi sikap, pemikiran, atau perilaku terhadap informasi tersebut.²

2. Kebijakan Publik

beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatian ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah, bukan apa maksud yang akan dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Terakhir, kelima, kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.³

3. Kebijakan Subsidi BBM

Subsidi energi di Indonesia pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) dan subsidi listrik. Namun dari kedua jenis subsidi energi, subsidi BBM memiliki porsi pengeluaran subsidi terbesar. Ketergantungan Indonesia

¹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta, Andi, 1980, Hal.88

² Dewi Salma Prawiradilaga dan Eveline Siregar, *Mozaik Teknologi Pendidikan*, Jakarta, Kencana, 2004, Hal.132

³ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta, 2006, Hal.7

terhadap BBM dan konsumsi BBM menjadi penyebab besarnya pengeluaran subsidi tersebut.

Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator yang digunakan agar mempermudah dalam pembahasan dan penelitian yang akan dilakukan. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Alasan diambilnya kebijakan pengurangan subsidi BBM.
2. Manfaat dari kebijakan subsidi BBM
3. BLT sebagai kompensasi kebijakan pengurangan subsidi BBM
4. Kebijakan subsidi pengganti yang lebih tepat untuk masyarakat kelompok ekonomi bawah.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan pendekatan dan analisis statistik deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai persepsi Mahasiswa FISIP Undip terhadap kebijakan pengurangan subsidi BBM. Kemudian mengidentifikasi persepsi yang ada sehingga dapat dideskripsikan dan dianalisis bagaimana persepsi Mahasiswa FISIP Undip.

Teknik pengambilan sampel menggunakan pengambilan sampel berstrata. Pengambilan sampel dilakukan dimana populasi dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam strata jurusan dan angkatan, kemudian diambil sampel secara random dengan proporsi yang seimbang sesuai dengan posisinya dalam populasi.

Data diperoleh melalui penyebaran angket atau kuesioner untuk merepresentasikan persepsi Mahasiswa Fisip Undip terhadap kebijakan pengurangan subsidi BBM. Kemudian untuk mendeskripsikan lebih dalam bagaimana persepsi Mahasiswa Fisip Undip terhadap kebijakan pengurangan subsidi BBM digunakan data hasil wawancara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahasiswa FISIP Undip mengetahui bahwa kondisi APBN terbebani dengan anggaran subsidi BBM yang terus meningkat setiap tahun. Walau saat ini sudah ditemukan teknologi RFID yang menurut responden bisa menjadi solusi pengurangan penggunaan BBM bersubsidi, RFID belum bisa diharapkan menghasilkan perubahan besar dalam pengurangan konsumsi BBM bersubsidi.

Mahasiswa FISIP Undip berpendapat bahwa kebijakan subsidi BBM tidak tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kalangan ekonomi menengah atas. Mahasiswa FISIP Undip juga berpendapat kebijakan subsidi BBM bukanlah kebijakan yang tepat jika dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kalangan ekonomi bawah, karena tidak dapat membantu masyarakat kalangan ekonomi bawah untuk meningkatkan taraf perekonomiannya.

Ironisnya walaupun Mahasiswa FISIP Undip memiliki persepsi seperti tersebut diatas, namun mereka tetap mendukung kebijakan subsidi BBM untuk diteruskan. Hal ini tentunya sangat berlawanan dengan temuan hasil penelitian yang menyebutkan Mahasiswa FISIP Undip paham bahwa kebijakan subsidi sangat membebani APBN, tidak tepat sasaran, dan tidak

berhasil membantu perekonomian masyarakat kalangan ekonomi bawah. Mahasiswa Fisip Undip berpendapat bahwa kebijakan subsidi BBM harus diteruskan bukan karena kebijakan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat kalangan ekonomi bawah, melainkan untuk tidak semakin membebani ekonomi masyarakat kalangan ekonomi bawah dengan meningkatnya harga BBM yang merupakan dampak langsung saat kebijakan subsidi BBM diambil.

Mahasiswa FISIP Undip juga berpendapat bahwa masyarakat kalangan ekonomi bawah membutuhkan kompensasi untuk mengurangi beban yang ditimbulkan dari kebijakan pengurangan subsidi BBM. Meskipun begitu Mahasiswa FISIP Undip tidak setuju dengan keputusan pemerintah yang menjadikan BLT sebagai kompensasi kebijakan pengurangan subsidi BBM karena kebijakan BLT dianggap mengajari masyarakat menjadi bermental peminta-minta. Terlebih lagi kebijakan BLT dianggap memiliki kepentingan politik.

Terakhir Mahasiswa FISIP Undip berpendapat bahwa pemerintah perlu mencari kebijakan lain yang dapat lebih efektif membantu perekonomian masyarakat kalangan ekonomi bawah sebagai pengganti kebijakan subsidi BBM, dan menurut Mahasiswa FISIP Undip kebijakan subsidi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat kalangan ekonomi bawah sebagai pengganti subsidi BBM adalah subsidi pendidikan

PENUTUP

1. Kesimpulan

Mahasiswa FISIP Undip berpendapat bahwa pemerintah melakukan langkah yang tepat dengan mengambil kebijakan pengurangan subsidi BBM, karena kebijakan subsidi BBM tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat kalangan ekonomi bawah dan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kalangan ekonomi menengah-atas. Namun Mahasiswa FISIP Undip berpendapat bahwa pemerintah melakukan kekeliruan dengan tidak mempersiapkan rencana penanggulangan yang cukup untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pengurangan subsidi BBM, karena kebijakan pengurangan subsidi BBM pastinya akan memberikan dampak buruk bagi ekonomi masyarakat kalangan ekonomi bawah. Hal inilah yang menimbulkan aksi penolakan terhadap kebijakan pengurangan subsidi BBM

2. Saran

Mahasiswa FISIP Undip berpendapat kebijakan subsidi yang paling tepat untuk masyarakat kalangan ekonomi bawah adalah subsidi pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu pemerintah harus mengoptimalkan kebijakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat kalangan ekonomi bawah.

DAFTAR PUSTAKA

Walgito, Bimo, 1980, Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta : Andi.

Prawiradilaga, Dewi Salma dan Siregar, Eveline, 2004, *Mozaik Teknologi Pendidikan*. Jakarta : Kencana.

Agustino, Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.